

EVALUASI IMPLEMENTASI KARTU JAKARTA PINTAR DI JAKARTA

Abdul Madjid Latief¹ dan Vitalis Nagul²

¹ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Madjid_latief@yahoo.co.id

² Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

ABSTRAK

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui konteks pelaksanaan program kartu Jakarta Pintar di Sekolah Slamet Riyadi 1, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, proses pelaksanaan, dan mengetahui ketercapaian pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melihat data dan fakta empiris. Pengambilan data dilakukan secara ilmiah yang meliputi observasi, wawancara secara terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, operator, guru – guru dan orang tua murid. Kemudian data tersebut dianalisis, *reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Kesimpulan penelitian ini, adalah yang melatarbelakangi pelaksanaan program kondisi ekonomi orang tua murid, adanya kesesuaian antar visi dan misi sekolah dan visi misi Kartu Jakarta Pintar, tidak adanya sosialisasi yang sistematis yang dilakukan secara berjenjang ataupun formal, tidak adanya sarana atau fasilitas yang diberikan kepada stakeholder, ketidaksesuaian proses pelaksanaan terletak pada tata urutan tindakan yang harus dilewati, dan respon orang tua murid terhadap pelayanan dan pelaksanaan sangat positif dan juga respon guru terkait Kartu Jakarta Pintar sangat mendukung pelaksanaan disekolah tersebut. Implikasi pelaksanaan program ini adalah bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga mendapat respon yang baik dari tim pelaksana program. Diharapkan tim pelaksana mengetahui tata urutan pelaksanaan program, dan berkomitmen untuk menjalankan program.

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Kartu Jakarta Pintar

ABSTRACT

This evaluation aims to determine the context of the implementation of the Jakarta Smart card program at Slamet Riyadi 1 School, readiness of human resources and infrastructure, the implementation process, and knowing the achievement of implementation. The method used in this evaluation is descriptive qualitative method by looking at empirical data and facts. Data retrieval is done scientifically which includes observation, structured interviews, and documentation. Interviews were conducted with school principals, operators, teachers and parents. Then the data is analyzed, reduction, data display, and conclusion. The conclusions of this study are the background of the implementation of the economic conditions of parents, the compatibility between the school's vision and mission and the Jakarta Smart Card vision and mission, the absence of systematic socialization carried out in stages or formally, the absence of facilities or facilities provided to stakeholders, the incompatibility of the implementation process lies in the order of actions that must be passed, and the

parents' response to service and implementation is very positive and also the teacher's response regarding the Jakarta Smart Card is very supportive of the implementation of the school. The implication of implementing this program is that it can have an impact on the family's economic welfare in meeting their needs, so that they get a good response from the program implementing team. It is expected that the implementation team will know the order of implementation of the program, and commit to running the program.

Keywords: Evaluation, Implementation, Jakarta Smart Card

PENDAHULUAN

Pendidikan hal yang sangat penting untuk menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual dan jauh dari kebodohan. Kemajuan suatu bangsa tergantung pada kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Jika negara itu maju, kaya atau berkembang maka sangat besar kemungkinannya bahwa sistem pendidikannya di negara tersebut sangat baik dan berkualitas. Begitu pula sebaliknya, jika negara itu miskin, tidak sehat secara ekonomi dan tidak mampu bersaing dengan negara lain maka kemungkinan besar sistem pendidikan yang ada disuatu negara tersebut tidak berkualitas.

Menurut data yang dihimpun dari UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) (CNN Indonesia, 2017).

DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara angka putus sekolahnya masih sangat tinggi. Data yang dihimpun dari Jakarta Open Data yang dikeluarkan Mei 2015 bahwa untuk provinsi DKI Jakarta anak yang putus sekolah dari semua jenjang ada 2.474 anak. Secara rinci angka putus sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) 221 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 552 orang, Sekolah Menengah Umum (SMU) 164 orang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1.537 orang.

Sumber masalah utama yang menjadi persoalan banyaknya siswa putus sekolah adalah faktor ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2017 sebesar 389,69 ribu orang (3,77%). Dibandingkan dengan September 2016 (385,84 ribu orang / 3,75%), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin. Sedangkan dibandingkan dengan Maret 2016

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 384,30 ribu orang (3,75%), jumlah penduduk miskin meningkat 5,39 ribu atau meningkat 0,02 poin (Badan Pusat Statistik, 2017).

Sistem pendidikan yang tertuang dalam peraturan daerah provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2006. Di dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan pada pasal 5 Ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Kemudian dipasal 16 huruf (f) dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Bentuk komitmen pemerintah provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pemberian dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) atau disebut dengan program Kartu Jakarta yang selanjutnya disingkat KJP, mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 174 Tahun 2015 pasal 1 ayat (40) yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah atau dengan kata lain dapat menurunkan jumlah siswa putus sekolah. Program kartu Jakarta pintar memberikan kemudahan dalam teknis penyaluran dana BBPP tersebut, yaitu berupa kartu ATM Bank DKI kepada para peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria penerima kartu jakarta pintar.

Tahun 2017 Jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemprov DKI Jakarta adalah Rp 3,2 triliun yang bersumber dari APBD 2017. Dana tersebut dialokasikan kepada 792.459 orang siswa. Dana BPSM yang diberikan untuk sekolah yang berstatus negeri dan swasta SD: Rp 210.000,00/ bulan, SMP: Rp. 260.000,00/bulan, SMA: Rp.375.000,00/bulan, SMK :Rp.90.000,00/ bulan, bantuan kejar paket belajar Rp.210.000,00/bulan.

Sejak diterbitnya program kartu Jakarta pintar, masih banyak kelemahan yang ditemukan di lapangan, baik dari hasil penelitian pendahuluan maupun berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya, terkait dengan implementasi program. Meskipun pemerintah sudah memperbaiki aturan, pengelolaan, dan mekanisme penyaluran dana, namun ketidakakuratan

data dan subjek penerima masih ditemukan (Penelitian Anggi Afriansyah). Adanya perhatian yang besar dari masyarakat provinsi DKI Jakarta akan program kartu jakarta pintar ini, peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul *Evaluasi Implementasi kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Slamet Riyadi 1 Jakarta Timur*. Karena bagaimanapun Program Kartu Jakarta Pintar sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pendidikan gratis kepada warga DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode evaluasi kualitatif deskriptif yaitu dengan melihat data dan fakta empiris. Menurut Lexy. J Moleong (2011) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pengambilan data dilakukan secara ilmiah yang meliputi observasi, wawancara secara terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, operator, guru – guru dan orang tua murid penerima Kartu Jakarta Pintar. Kemudian data tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan analisis *reduction, data display, dan conclusion*. Model yang digunakan dalam evaluasi ini adalah model CIPP (*Context, Input, Process dan Product*). Keempat kata yang disingkat dengan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model yang memandang program yang dievaluasi adalah sebuah sistem. Dengan demikian, untuk mengevaluasi program harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen – komponennya. Ketepatan penentuan model evaluasi dalam mengevaluasi suatu program merupakan hal yang sangatlah penting dalam mengevaluasi suatu program yang telah berjalan ataupun akan berjalan.

Menurut Eka Putro Widoyoko (2012) Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the*

worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut Daniel L. Stufflebeam (Dalam Eko Putro Widoyoko, 2012) mendefinisikan bahwa *evaluation is the process of deliniating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgmental information about some object's merit, worth, probity, and significance in order to guide decision making, support accountability, disseminate effective practices, and increase understanding of the involved phenomena.*

Program adalah dapat diartikan “rencana”, sebuah program bukanlah hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Evaluasi program adalah upaya untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur seberapa jauh sebuah kebijakan dapat terimplementasikan (Suharsimi Arikunto dan Safruddin Abdul, 2014). Dari pandangan para ilmuwan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya sistematis untuk mengukur, menganalisis, mengumpulkan informasi mengenai program yang dilaksanakan dalam membantu memberi masukan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Wirawan (2017) tujuan melaksanakan evaluasi antara lain ; (a) mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, (b) menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, (c) mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, (d) mengambil keputusan mengenai program dan (e) mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. Pandangan lain yang dikemukakan oleh Suharsimi & Safruddin (2016) mengatakan bahwa tujuan evaluasi program dilakukan adalah (1) untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, (2) untuk mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang yang belum terlaksana dan apa penyebabnya

Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, kelompok atau pejabat pemerintahan, swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Muhandi (2012) Implementasi Kebijakan Pendidikan harus *Good Governance* yaitu (1) *Transparansi*, artinya pelaksanaan kebijakan pada setiap tahapan harus terbuka dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. (2) *Akuntabel*, yaitu setiap tahapan kegiatan, hasil kegiatan dan keuangannya bisa dipertanggung jawabkan. (3) *Fairness*, yaitu bahwa pengguna atau masyarakat harus benar-benar memperoleh kesempatan dan hak secara adil dan proporsional. (4) *Responsif*, berarti pelaksanaan kebijakan benar - benar harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya masyarakat pendidikan.

TEMUAN EVALUASI DAN PEMBAHASAN

Konteks Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di SD Slamet Riyadi

Respon informan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Swasta Ignatius Slamet Riyadi sangat mendukung program yang dilaksanakan pemerintah. Pendapatan atau penghasilan orang tua murid Sekolah Dasar Slamet Riyadi berdasarkan data hasil analisis kondisi orang tua murid bahwa ekonomi orang tua murid dikategorikan menengah kebawah. Dalam konteks penerapan kebijakan kartu Jakarta Pintar sangatlah relevan dengan kondisi ekonomi orang tua murid. Dari hasil wawancara kepada stakeholder pelaksana program bahwa ada beberapa tujuan yang ingin diharapkan oleh stakeholder program, diantaranya adalah (1) banyak anak yang bisa sekolah dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak ; (2) banyak murid-murid anak-anak yang mau bersekolah di Sekolah Dasar Slamet Riyadi khususnya bagi anak-anak yang beragama Kristen ; (3) tidak ada anak-anak yang sampai putus sekolah ; (4) membantu kesejahteraan orang tua murid yang ekonominya masih kurang mampu ; (5) membantu anak – anak yang punya potensi besar untuk maju dan berkembang untuk mendapat pendidikan yang layak begitu.

Tabel 1. Pendidikan Orang Tua Murid SDS

No	Orang	Pendidikan Terakhir
----	-------	---------------------

	Tua Murid	SMA	D3	S1	S2	Lain-lain
1	Ayah	28 %	9 %	36 %	5 %	22 %
2	Ibu	28 %	18 %	30 %	2 %	22 %

Latar belakang pendidikan umumnya sangat berpengaruh pada pekerjaan dan penghasilan/pendapatan secara financial seseorang. Dari studi dokumen yang dilakukan ditemukan bahwa pekerjaan orang tua murid di Sekolah Dasar Slamet Riyadi 1 sangat bervariasi.

Tabel 2. Pekerjaan Orang Tua Murid

Jenis Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik (Ayah)					
	PNS/POLRI/TNI	Karyawan Swasta	Wiraswasta	Tidak Bekerja	Lain-lain
1	12 %	52 %	11 %	1 %	24 %
Jenis Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik (Ibu)					
	PNS/POLRI/TNI	Karyawan Swasta	Wiraswasta	IRT	Lain-lain
2	1 %	26 %	2 %	46 %	26 %

Pendidikan dan juga jenis pekerjaan sangat berdampak pada penghasil seseorang. Gambaran pendapat orang tua murid Sekolah Dasar Slamet Riyadi 1 bahwa persentase pendapatan orang tua Sekolah Dasar Slamet Riyadi adalah yang lebih banyak adalah kisaran Rp.2.000.000 – Rp4.999.000 atau sekitar 60 % dari jumlah keseluruhan orang tua murid laki – laki. Sementara untuk orang tua murid perempuan yang lebih banyak adalah orang tua murid yang penghasilannya dibawa Rp.500.000,00. Dari dari penghasilan ini juga dapat dikorelasi dengan pekerjaan orang tua murid Sekolah Dasar Slamet Riyadi 1. Yang mayoritas pekerjaannya adalah karyawan swasta.

Keadaan ekonomi orang tua siswa, berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari data tentang keadaan ekonomi orang tua siswa bahwa pekerjaan orang tua, kondisi riil rumah tangga, kondisi riil siswa yang dilihat secara langsung memang sangat sesuai dengan data/dokumen yang didapat dari sekolah.

Sumber Daya Manusia Pendukung Pelaksanaan Program

Faktor sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam Implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara menggambarkan bahwa pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Slamet Riyadi tidak ada persiapan secara khusus. Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar hanya menunggu informasi dari dinas terkait untuk pelaksanaan ketahap berikut. Kepala sekolah atau operator hanya menyampaikan Informasi secara lisan kepada wali kelas untuk pelaksanaan program.

Sarana dan Prasaran Pendukung Pelaksanaan Program

Keberhasilan suatu program tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung seperti, fasilitas pelayanan program , administrasi yang berkaitan dengan pelaksana program dan *money*. Hasil wawancara yang di dapatkan bahwa para pelaksana program rela mengeluarkan biaya sendiri untuk proses pelaksanaan program.

Mekanisme pendataan dan penentuan peserta penerima Kartu Jakarta Pintar

Penentuan peserta penerima bantuan kartu Jakarta pintar dalam pelaksanaan di Sekolah Dasar Slamet Riyadi bahwa proses penentuan peserta yang dilakukan oleh guru kelas sangat berbanding terbalik dengan petunjuk pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar. Proses penentuan penerima Kartu Jakarta Pintar hanya melihat secara visual saja baik dari bentuk tubuh, pakaian yang dikenakan dan juga melihat Kartu Keluarga orang tua murid.

Verifikasi Data Penerima Kartu Jakarta Pintar

Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa keluarga penerima Kartu Jakarta Pintar benar – benar termasuk kategori tidak mampu dan layak untuk mendatakan dana Kartu Jakarta Pintar. Hasil data atau informasi melalui wawancara menyatakan bahwa Informan atau guru – guru kelas yang bertugas melakukan survey lapangan telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan verifikasi langsung kelapangan.

Mekanisme Penyaluran Dana Kartu Jakarta Pintar

Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara yang didapat informasi bahwa Orang tua murid yang baru pertama kali menerima Kartu Jakarta Pintar akan diundang oleh sekolah untuk penerimaan buku tabungan dan kartu Kartu Jakarta Pintar. Sedangkan untuk peserta Kartu Jakarta Pintar yang lama proses pencairannya langsung kepada rekening peserta

penerima Kartu Jakarta Pintar. Penyaluran dana yang dilakukukan oleh sekolah kepada orang tua sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diberikan.

Pelaporan Penggunaan Dana Kartu Jakarta Pintar

Hasil studi dokumen dan wawancara bahwa pelaporan penggunaan dana oleh peserta penerima Kartu Jakarta Pintar tidak dilakukan. Alasannya yang disampaikan oleh orang tua murid adalah sekolah tidak meminta pelaporan penggunaan dana. Orang tua juga tidak mempunyai inisiatif untuk melaporkan penggunaan dana yang telah mereka gunakan. Akan tetapi setiap transaksi yang berkaitan dengan kartu Jakarta pintar orang tua selalu mengumpulkan kwitansi bukti transaksi.

Respon Tim Pelaksana Program dan Orang Tua

Dalam konteks pelaksanaan evaluasi kartu Jakarta pintar peneliti ingin mengetahui kepuasan para orang tua dalam pelaksanaan dan pelayanan yang diberikan oleh sekolah Sekolah Dasar Swasta Ignatius Slamet Riyadi. Hasil wawancara yang antara peneliti dengan orang tua menyatakan pelayanan Kartu Jakarta Pintar tersebut yang diberikan oleh para guru, dan operator sangat baik. Dari studi dokumen hasil observasi langsung maupun yang ada disekolah bahwa kondisi rumah atau kontrakan yang ditempati peserta penerima Kartu Jakarta Pintar sudah sangat sesuai dengan syarat yang diberikan pemerintah.

Sasaran Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar

Program bantuan pembiayaan melalui Kartu Jakarta Pintar sarasannya adalah orang miskin dan orang yang rentan miskin sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Dari studi dokumen dan temuan yang terdapat pada aspek konteks, input dan proses bahwa pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar belum sepenuhnya di jalankan, Hal ini ditandai dengan masih banyak orang tua murid yang mempunyai pendapatan yang sama dengan orang tua murid peserta penerima Kartu Jakarta Pintar yang belum mengajukan Kartu Jakarta Pintar, karena keterbatasan Informasi dan prosedur yang diberikan oleh pelaksana program.

Program Kartu Jakarta Pintar merupakan program strategis pemerintah daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sekaligus mengurangi angka pengangguran yang terjadi. Pelaksana program Kartu Jakarta Pintar diperuntukan untuk orang

tua murid yang tidak mampu secara ekonomi. Disamping itu program Kartu Jakarta Pintar merupakan perintah peraturan daerah bahwa pasal 5 Ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Kemudian dipasal 16 huruf (f) dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Pemberian Kartu Jakarta Pintar merupakan kesempatan bagi semua penduduk untuk mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan manusiawi. Diharapkan tidak ada ketimpangan sosial bagi penduduk miskin dan tidak mampu, karena memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Kartu Jakarta Pintar memberikan kesempatan siswa untuk membeli barang-barang atau kebutuhan dasar untuk keperluan pendidikan. Mereka punya kesempatan yang sama dengan siswa yang lebih beruntung secara finansial. Menurut theory of justice yang dikemukakan Rawls (2006), ada dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Rawls (2006) menjelaskan bahwa distribusi kekayaan harus sejalan dengan pendapatan, dan hierarkis otoritas harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan, artinya orang-orang dengan kemampuan dan kecakapan yang sama harus punya peluang hidup yang sama juga.

Dalam implementasi kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Slamet Riyadi ditemukan permasalahan yang bervariasi. Faktor yang paling terlihat adalah faktor sumber daya manusia pendukung pelaksana program. Dimana sumber daya manusia pelaksana program tidak dibekali dengan sosialisasi yang berjenjang atau terstruktur sebelum menjalankan program. Menurut Warwick, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program adalah komitmen para pelaksana proyek. Yang menjadi dasar pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Swasta Ignatius Slamet Riyadi adalah kondisi ekonomi orang tua murid yang

di gambarkan dalam temuan evaluasi bahwa rata – rata ekonomi orang tua murid disekolah tersebut masih kurang dengan kondisi dan biaya hidup di Jakarta yang begitu tinggi. Menurut Matin (2014) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik berupa uang maupun bukan uang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap upaya pencapaian tujuan. Dalam Jurnal pembiayaan pendidikan oleh Rida Fironika juga menyatakan bahwa (a) sekolah mahal dikarenakan dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan di tingkat sekolah, (b) kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat, (c) mental pejabat. Ketiga hal tersebut yang membuat orang tua yang pendapatannya pas – pasan kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya *over-education*, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah. Dalam hasil penelitian lain yang di rilis oleh Jurnal kependudukan Indonesia menggambarkan bahwa persentase kepala rumah tangga yang miskin yang pendidikannya memenuhi wajib belajar 9 tahun atau pada jenjang SMP hanya sebesar 8,79 persen dan persentase kepala rumah tangga yang tidak miskin sudah mencapai 32,83 persen (Badan Pusat Statistik,2014). Jika dilihat dari upah atau pendapatan bersih yang diterima tenaga kerja perbulan untuk tenaga kerja yang tidak sekolah atau tamat SD memiliki pendapatan terendah rata – rata terendah 1,3 juta rupiah, dan untuk tenaga kerja lulusan perguruan tinggi diperkirakan rata – rata 3, 6 juta rupiah terhitung dari Februari 2016.

Permasalahan lain yang timbul dalam evaluasi adalah proses penentuan penerima Kartu Jakarta Pintar hanya melihat secara visual saja baik dari bentuk tubuh, pakaian yang dikenakan dan juga melihat Kartu Keluarga orang tua murid. Hal tersebut sangat bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan kartu jakarta pintar. Di dalam petunjuk pelaksanaan menyatakan bahwa orang yang berhak menerima Kartu Jakarta Pintar orang yang miskin dan rentan miskin. Artinya untuk mendaftar Kartu Jakarta Pintar siapa saja boleh melakukan, dengan mendownload sendiri berkas pengajuan di website Kartu Jakarta Pintar. Untuk penentuan lebih lanjut siswa itu layak atau tidak melalui survey atau verifikasi langsung kelapangan. Menurut Muhdi (2012) dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan harus transparan artinya setiap tahapan kebijakan harus dapat diakses secara luas oleh masyarat, hal lainnya juga

menegaskan bahwa dalam melaksanakan program harus *Fairness* artinya pengguna atau masyarakat harus benar-benar memperoleh kesempatan dan hak secara adil dan proporsional.

Temuan lainnya dalam evaluasi bahwa masih banyak orang tua murid yang mempunyai pendapatan yang sama dengan orang tua murid peserta penerima Kartu Jakarta Pintar yang belum mengajukan Kartu Jakarta Pintar, karena keterbatasan Informasi dan prosedur yang diberikan oleh pelaksana program. Tidak tepatnya pengelolaan administratif berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima Kartu Jakarta Pintar. Tata kelola menjadi salah satu fokus perbaikan yang harus dilakukan agar dana KJP dapat dinikmati oleh mereka yang memang membutuhkan bantuan. Ini pula yang disadari oleh pemerintah DKI, sehingga perbaikan pengelolaan kemudian dilakukan. Menurut Muhdi Implementasi kebijakan pendidikan sasarannya adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan. Hasil yang dicapai oleh implementasi kebijakan pendidikan adalah mutu pendidikan masyarakat. Dari pendapat tersebut jelas bahwa sasaran dalam pelaksanaan program kartu Jakarta pintar belum sepenuhnya berjalan. Tidak tercovernya sebagian orang tua murid yang belum mendapat program dikarenakan faktor komunikasi dan sosialisasi. Menurut Yoana Mega (2016) komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program. Pandangan Muhdi lain juga menguatkan bahwa sebagai penentu berhasil tidaknya kebijakan pendidikan harus menerapkan prinsip *good governance* yaitu, *transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsivitas*.

KESIMPULAN

Konteks yang melatarbelakangi pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Swasta Ignatius Slamert Riyadi *pertama* adalah kondisi orang tua murid yang pendapatannya berkisar Rp. 2.000.000 – Rp. 4.999.000 atau sekitar 60 % dari jumlah keseluruhan orang tua murid laki – laki , tidak sesuai dengan biaya hidup yang ada di Jakarta, *kedua* adanya kesesuaian antar visi dan misi sekolah dan visi dinas yang terkait dengan Kartu Jakarta Pintar (P4OP). Hal demikian yang membuat tim pelaksana program sangat mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

Kesiapan sumber daya manusia dan pendukung program yang kurang ditandai kurangnya sosialisasi secara sistematis yang diberikan kepala sekolah atau operator secara detail terkait program. Berkaitan dengan sarana dan prasana, tidak ada fasilitas yang diberikan oleh dinas P4OP atau sekolah selama pelaksanaan program berjalan, tapi operator sekolah boleh mengambil dana Kartu Jakarta Pintar yang disediakan untuk kebutuhan pelaksanaan seperti transport. Penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar tersebut sangat bertentangan dengan petunjuk pelaksana yaitu dana bantuan tersebut hanya diperuntukan untuk peserta penerima Kartu Jakarta Pintar.

Proses pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana teknis yang diberikan oleh dinas P4OP. Ketidaksihesuaian proses pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Slamet Riyadi terletak pada tata urutan tindakan/proses yang harus dilewati.

Ukuran ketercapaian pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Slamet Riyadi adalah sasaran dan respon sasaran pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh dinas terkait, yaitu dana Kartu Jakarta Pintar diperuntukan orang yang miskin dan rentan miskin. Respon orang tua murid terhadap pelayanan dan pelaksanaan sangat positif dan juga respon guru terkait Kartu Jakarta Pintar sangat mendukung pelaksanaan di sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi & Abdul Jabar, Safruddin .2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, “*Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta Maret 2017*”, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/18/246/tingkat-kemiskinan-di-dki-jakarta-maret-2017.html>, pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 16.22.
- CNN Indonesia, “*Edukasi, Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia*”, diakses dari <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/>, pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 14.37.

- Fironika, Fida.____. *Pembiayaan Pendidikan Indonesia*. Semarang : Universitas Sultan Agung
- Jakarta Open Data,”Dinas Pendidikan, Data Jumlah Siswa Putus Sekolah”, diakses dari http://data.jakarta.go.id/organization/dinaspendidikan?q=putus+sekolah&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc, pada tanggal 18 Mei 2018
- Merawati, Desi. 2017. *Evaluasi Terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMP Al-Abror Kembangan Jakarta Bara*. Jakarta, Sekolah Pasca Sarjana Prof. Dr. Uhamka
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhdi.2012. *Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Kota Semarang Pada Era Otonomi Daerah*. Semarang : PPs Universitas Negeri Semarang.
- Pertiwi, Yoani Mega & Yuningsih,Tri .2016. *Pentingnya Faktor Komunikasi Dalam Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Pada Sekolah Dasar (Sd) Negeri Di Kota Administrasi Jakarta Timur*. Jakarta : Gema Publica (Jurnal Online),
- Widoyoko, Eka Putra.2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Wirawan.2016. *Evaluasi, Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada